**KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENANGANAN ANAK TERLANTAR DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG**

Muhammad Ceasar Aldafa

NPP. 30.0467

*Asdaf Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung*

*Prodi Studi Manajemen Sumber Daya Manusia*

Email: ceasaraldafa@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Dra. Hj. Nurbaiti, MM.

**ABSTRACK**

**Problem Statement/Background (GAP):** Children have a strategic position in the eyes of the law as stipulated in Article 28 B Paragraph (2) of Law D 1945. However, not all children can feel optimal growth and development and they must even jump into the streets to support it. **Purpose:** The purpose of this study is to determine the performance of Civil Servants of the Social Service of Central Lampung Regency in handling abandoned children, find out what are the obstacles in handling abandoned children and the efforts made by the Social Service in overcoming obstacles that occur. **Methods:** The research methods used are qualitative methods, data collection techniques with observation, documentation, and interviews which then the data is analyzed with miles and hubberman techniques, namely reduction, presentation and drawing of conclusions and data verification. **Results:** The results of the study, it is known that Civil Servants in Social Services in handling abandoned children have a planned quantity of work based on ability, satisfactory work quality, knowledge of sufficient work, willing to cooperate with other parties, high attendance discipline and can be trusted in work, with good and good quality of each civil servant but the absence of innovation initiatives in handling abandoned children. There are constraints in the form of time, human resources, and budget. The social service made efforts by collaborating with Satpol PP. **Conclusion:** The performance of Civil Servants in handling abandoned children in the Central Lampung Regency Social Service based on Bernadin Russell's Theory of Apparatus Performance consisting of seven aspects, it was found that the quantity of work of the Central Lampung Regency Social Office consisted of five activities in two fields with work quality reaching 100% in handling abandoned children. As for the quality of civil servants, they have sufficient knowledge related to tupoksi and abandoned children with discipline, work attendance, and are willing to work together, but there has been no innovation related to handling abandoned children. Keywords: Abandoned Children and Apparatus Performance

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Anak memiliki kedudukan yang strategis dimata hukum yang tertuang dalam Pasal 28 B Ayat (2) Undang-Undang D 1945. Namun, tidak semua anak dapat merasakan pertumbuhan dan perkembangan yang optimal dan bahkan harus terjun kejalanan untuk menghidupinya. **Tujuan:** Tujuan dilaksanakannya penelitian ini untuk mengetahui kinerja Pegawai Negeri Sipil Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah dalam penanganan anak terlantar, mengetahui apa saja yang menjadi hambatan dalam penanganan anak terlantar dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam mengatasi hambatan yang terjadi. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif, teknik pengumpulan data dengan observasi, dokumentasi dan wawancara yang kemudian datanya dianalisis dengan teknik miles and hubberman yaitu reduksi, penyajian dan penggambaran kesimpulan dan verifikasi data. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian, diketahui bahwa Pegawai Negeri Sipil di Dinas Sosial dalam penanganan anak terlantar memiliki kuantitas kerja yang telah direncanakan berdasarkan kemampuan, kualitas kerja yang memuaskan, pengetahuan tentang pekerjaan yang mencukupi, mau bekerjasama dengan pihak lainnya, kedisiplinan kehadiran yang tinggi dan dapat dipercaya dalam pekerjaan, dengan kualitas masing-masing PNS yang bagus dan baik namun tidak adanya inisiatif inovasi penanganan anak terlantar. Terdapat hambatan berupa waktu, SDM dan anggaran. Dinsos melakukan upaya dengan menjalin kerjasama dengan Satpol PP. **Kesimpulan:** Kinerja Pegawai Negeri Sipil dalam penanganan anak terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan Teori Bernadin Russell tentang Kinerja aparatur yang terdiri dari tujuh aspek didapati bahwa kuantitas kerja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari lima kegiatan di dua bidang dengan kualitas kerja yang mencapai 100% dalam penanganan anak terlantar. Sedangkan untuk kualitas PNS memiliki pengetahuan yang mencukupi terkait dengan tupoksi dan anak terlantar dengan kedisiplinan kehadiran kerja serta mau bekerja sama namun belum ada inovasi terkait penanganan anak terlantar.

**Kata Kunci :** Anak Terlantar dan Kinerja Aparatur

1. **PENDAHULUAN**
	1. **Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara hukum sehingga segala hal yang berkaitan tentang berbangsa, bermasyarakat dan bernegara diatur dalam hukum yang berlaku. Ketentuan tersebut berlaku terhadap perlindungan hak anak dalam Pasal 1 dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan hak asasi manusia yang dilindungi, dijamin dan dipenuhi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Negara Indonesia melakukan berbagai upaya dalam memberikan perlindungan terhadap anak mulai sejak dini dengan harapan anak dapat ikut serta secara optimal dalam pembangunan bangsa dan negara. Pada Pasal 2 Undang-undang nomor 4 tahun 1979 menjelaskan tentang anak memiliki hak atas perlindungan dan pemeliharaan semasa kandungan ataupun sesudah dilahirkan sehingga anak dapat memiliki perkembangan dan pertumbuhan yang wajar. Dasar hukum tersebut memiliki makna untuk memberikan suatu usaha dan upaya yang dilakukan oleh negara kepada anak sehingga mendapatkan suatu perlakuan yang adil dan benar serta mencapai tujuan kesejahteraan anak.

Keberlangsungan suatu negara dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mana salah satunya adalah masyarakat atau warga negara sebagai sumber daya manusia. Satu dari beberapa indikator keberhasilan dari suatu negara yaitu terletak pada kualitas sumber daya manusia di saat ini serta perkembangan peningkatan kualitas sumber daya manusia dimasa yang akan datang. Satu sumber daya manusia yang memiliki nilai sangat berharga serta yang paling utama yaitu anak. Anak adalah suatu karunia dan tanggung jawab yang diberikan kepada generasi sebelumnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut menjadikan keberadaanya harus dirawat dan dijaga serta dalam kehidupannya melekat semua hak-hak yang harus dijunjung dan dihormati (Sandi, 2016, hal. 151).

Sudut pandang hukum memperlihatkan bahwa anak memiliki suatu kedudukan dan posisi yang strategis didepan hukum serta menjadi subjek hukum yang mana kewajiban dan hak yang mendapat jaminan hukum (Sandi, 2016, hal. 152). Hubungan keberlangsungan peradaban dan kemajuan suatu bangsa dan negara dengan anak merupakan hubungan yang tidak dapat terpisahkan. Hal tersebut menjadikan anak mempunyai suatu peran yang sangat strategis dalam keberhasilan suatu bangsa. Sehingga dalam konstitusi Indonesia secara tegas memastikan segala hak yang dimiliki oleh anak untuk berkembang, pertumbuhan, perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan serta kelangsungan hidup. Konsitusi tersebut tertuang dalam Pasal 28 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun (Cibro et al., 2019, hal. 394).

Anak terlantar menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dinyatakan sebagai anak yang tidak terpenuhi kebutuhan fisik, sosial, spiritual, dan mental secara wajar. Anak terlantar merupakan anak dengan usia 5-18 tahun yang sebagian besar waktunya dihabiskan dijalanan untuk mencari nafkah dan berkeliaran di tempat umum (Firadika, 2017, hal. 8). Anak terlantar merupakan salah satu tugas dari pemerintah yang diamanatkan berdasarkan Ayat (1) Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa negara memelihara anak-anak terlantar. Ayat tersebut menjelaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan memelihara terhadap anak-anak yang tidak dapat tercukupi hak-haknya dan atau anak terlantar (Syahra, 2018, hal. 5).

Realisasi capaian tentang presentase anak yang memeperoleh rehabilitasi sosial diluar panti dengan standar pelayanan minimal (SPM) jika diambil data dari 2018-2020 rata-rata capaiannya dibawah 50% atau hanya di 42,76%. Nilai capaian dibawah 50% menimbulkan suatu pertanyaan terkait kondisi yang terjadi serta menarik untuk diteliti sehingga mengetahui apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Peneliti menjadikan hal tersebut sebagai salah satu identifikasi masalah dilakukannya penelitian. Penelitian yang dihubungkan dengan sumber daya manusia yaitu Pegawai Negeri Sipil di Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah. Sehingga menjadikan sebuah permasalahan yang patut diteliti tentang kinerja Pegawai Negeri Sipil Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah. Berdasarkan Laporan Pertanggung Jawaban Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2020 bahwa Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, gelandangan pengemis, anak terlantar dan lanjut usia terlantar di luar panti mendapatkan anggaran Rp. 19.775.000,00. Namun, Hanya terealisasi Rp. 11.595.000,00. Penggunaan anggaran yang hanya di angka 58,63% menjadi sebuah indikasi permasalahan dan pertanyaan tentang kinerja Pegawai Negeri Sipil. Bagaimana kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah dalam penanganan anak terlantar. Anggaran yang sudah disediakan negara untuk menjalankan tugas dan amanah Undang-Undang Dasar 1945 belum dapat berjalan dengan optimal.

Berbicara tentang anggaran, ada sebuah berita yang dipublikasikan oleh monologis.id pada hari senin, 08 Maret 2021 pukul 13.44 WIB dengan judul berita “Penanggulangan Permasalahan Sosial di Lampung Tengah Terkendala Anggaran”. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Lampung tengah, Jamalludin menjelakan bahwa penanganan permasalahan sosial masih terhambat anggaran dikarenakan masa pandemi COVID-19. Hal tersebut bertentangan dengan data realisasi anggaran. Terkhusus di bidang rehabilitasi sosial penyerapan dan penggunaan anggaran di tahun 2020 hanya di angka 58,63%. Selain terhambat dengan anggaran. Penanganan permasalahan anggaran terbatasi dengan belum memiliki Rumah Perlindungan Sosial (RPS) atau Shelter untuk penanganan sementara permasalahan sosial tersebut (Admin, 2021).

Peneliti menjadikan hal tersebut sebagai dasar penulis untuk menganalisis dan mengulas permasalahan yang terjadi dengan melakukan penelitian dengan judul **“KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENANGANAN ANAK-ANAK TERLANTAR DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG”.**

* 1. **Kesenjangan Masalah**

Realisasi capaian tentang presentase anak yang memeperoleh rehabilitasi sosial diluar panti dengan standar pelayanan minimal (SPM) jika diambil data dari 2018-2020 rata-rata capaiannya dibawah 50% atau hanya di 42,76%. Nilai capaian dibawah 50% menimbulkan suatu pertanyaan terkait kondisi yang terjadi serta menarik untuk diteliti sehingga mengetahui apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Peneliti menjadikan hal tersebut sebagai salah satu identifikasi masalah dilakukannya penelitian. Penelitian yang dihubungkan dengan sumber daya manusia yaitu Pegawai Negeri Sipil di Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah. Sehingga menjadikan sebuah permasalahan yang patut diteliti tentang kinerja Pegawai Negeri Sipil Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah. Berdasarkan Laporan Pertanggung Jawaban Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2020 bahwa Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, gelandangan pengemis, anak terlantar dan lanjut usia terlantar di luar panti mendapatkan anggaran Rp. 19.775.000,00. Namun, Hanya terealisasi Rp. 11.595.000,00. Penggunaan anggaran yang hanya di angka 58,63% menjadi sebuah indikasi permasalahan dan pertanyaan tentang kinerja Pegawai Negeri Sipil. Bagaimana kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah dalam penanganan anak terlantar. Anggaran yang sudah disediakan negara untuk menjalankan tugas dan amanah Undang-undang Dasar 1945 belum dapat berjalan dengan optimal. Berbicara tentang anggaran, ada sebuah berita yang dipublikasikan oleh monologis.id pada hari senin, 08 Maret 2021 pukul 13.44 WIB dengan judul berita “Penanggulangan Permasalahan Sosial di Lampung Tengah Terkendala Anggaran”. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Lampung tengah, Jamalludin menjelaskan bahwa penanganan permasalahan sosial masih terhambat anggaran dikarenakan masa pandemi COVID-19. Hal tersebut bertentangan dengan data realisasi anggaran. Terkhusus di bidang rehabilitasi sosial penyerapan dan penggunaan anggaran di tahun 2020 hanya di angka 58,63%. Selain terhambat dengan anggaran. Penanganan permasalahan anggaran terbatasi dengan belum memiliki Rumah Perlindungan Sosial (RPS) atau Shelter untuk penanganan sementara permasalahan sosial tersebut (Admin, 2021).

* 1. **Penelitian Terdahulu**

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Arimbi Yuniza Dian Sekarini pada tahun 2018 dengan judul Analisis Kinerja Aparatur Dalam Pembinaan Anak Jalanan Di Dinas Sosial Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur dengan hasil didapatkan bahwa Aparatur Dinsos Kota Samarinda memiliki kinerja yang belum optimal pada dimensi efektivitas, ketepatan waktu, kuantitas dan kualitas. Sedangkan dalam dimensi komitmen dan kemandirian, kinerja aparatur Dinsos Kota Samarinda dapat dikatakan sudah baik. Penelitian tersebut berhasil menemukan hambatan yang terjadi dan upaya mengatasinya (Yuniza & Sekarini, 2018)..

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Angelina Sajow, Sarah Sambiran dan Josef Kairupan pada tahun 2019 dengan judul Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menangani Anak Terlantar di Kota Manado. Dengan hasil didapatkan bahwa produktivitas berlum maksimal karena adanya hambatan dan kendala dari penanganan pemberian bantuan sosial. Penilaian dari segi dimensi kualitas layanan sudah baik sehingga perlu dipertahankan dan ditingkatkan Kembali. Kesimpulan terakhir tentang responsivitas pemerintah yang didapati bahwa tidak berjalan dengan sesuai prosedur (Sajow et al., 2019).

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Lenny Husna dan Dedi Epriadi yang dilakukan pada tahun 2020 dengan judul Analisis Kinerja Pemeirntah Daerah Dalam Penanganan Anak Terlantar Usia Sekolah. Penelitian tersebut dilakukan dengan dengan pedoman sepuluh kriteria hak dasar anak yaitu hak mendapatkan pelayanan Kesehatan, makanan, status, pengakuan, perlindungan, Pendidikan, bermain, berekreasi, mendapatkan peran dan pembangunan serta hak kesamaan. Berdasarkan data yang didapatkan dan dianalisis kemudian peneliti memberikan masukan kepada Dinsos Kota Batam terkait dengan permasalahan yang terjadi (Epriadi Dkk, 2020).

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Uen Haeruman dengan judul Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya dengan hasil Penelitian ini dijadikan tinjauan pustaka penelitian terdahulu dikarenakan adanya hubungan antar sumber daya instansi pemerintah terhadap hasil kinerja instansi yang bersangkutan. Kinerja pegawai mempengaruhi pencapaian organisasi. Teori yang digunakan dalam pengukuran kinerja yaitu teori Moeheriono dengan enam kategori yaitu keselamatan, produktivitas, ketepatan waktu, kualitas, efisiensi dan efektif (Haeruman, 2021).

* 1. **Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, Berdasarkan tinjauan penelitian sebelumnya yang diambil menurut perbedaan fokus, lokus dan teori sehingga menjadi perbandingan dengan yang akan peneliti lakukan. Peneliti berfokus terkait permasalahan yang ada dalam penanganan anak terlantar dengan Lokus penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah. Metode yang digunakan oleh peneliti yaitu pendekatan kualitatif dengan menggunakan teori Bernadin Rusell (1993) tentang pengukuran kinerja pelayanan publik. Sumber data yang digunakan dalam penelitian yaitu sumber data primer dan sekunder yang didapatkan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan dengan *Purposive Sampling* dan *Snowball Sampling*. Sedangkan untuk analis data menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

* 1. **Tujuan**

Penelitian ini bertujuan guna mengetahui dan menganalisis Bagaimana kinerja Pegawai Negeri Sipil Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah dalam penanganan anak terlantar, Apa hambatan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah dalam menangani anak terlantar, Apa upaya Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah dalam mengatasi permasalahan penanganan anak terlantar.

1. **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori Pengukuran Kinerja Pelayanan Publik Menurut Bernadin dan Russell 1993 yang diolah oleh (Pananrangi & Bahri, 2021)*.*

Informan pada penelitian ini terdapat 9 informan yang terdiri dari Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah dan 5 masyarakat. Penelitian yang menggunakan desain kualitatif. Terdapat dua sumber data dalam penelitian ini yaitu Data primer merupakan data dan informasi yang didapatkan oleh peneliti secara langsung atau menjadi tangan pertama. Data primer sebagai data dan informasi yang didapatkan langsung oleh peneliti sebagai sumber pertama yang diperoleh dari wawancara, observasi dan informan. Data sekunder merupakan data yang didapatkan dan diperoleh oleh orang atau pihak lain selain oleh peneliti yang kemudian peneliti dapatkan sebagai sumber kedua. Data sekunder seperti dokumen laporan, buku pedoman, Pustaka ataupun penelitian terdahulu. Data sekunder berfungsi sebagai data pelengkap penelitian (Samsu, 2017, hal. 95).

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**
2. **Kinerja Pegawai Negeri Sipil Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah Dalam Penanganan Anak Terlantar**

Penelitian yang dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah salah satu tujuannya untuk mengetahui kinerja Pegawai Negeri Sipil dalam penanganan anak terlantar. Untuk mengetahui hal tersebut peneliti menggunakan teori Bernadin Russell (1993) tentang konsep pengukuran kinerja pelayanan publik. Berikut merupakan hasil penelitian mengenai kinerja Pegawai Negeri Sipil berdasarkan teori Bernadin Russell.

* 1. ***Quantity of work.***

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi terkait kuantitas pekerjaan dalam periode satu tahun anggaran di tahun 2021 di ketahui melalui dokumen Lakip Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah tahun 2021 bahwa kegiatan terkait anak terlantar sebagai berikut :

**Tabel 3.1
Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah terkait anak terlantar**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Kegiatan | Target | Realisasi | Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti | 35% | 35% | 100% |
| 2 | Terpenuhinya pemberian pelayanan reunifikasi keluarga | 80 Orang | 60 orang | 75% |
| 3 | Terpenuhinya penyediaan sandang bagi anak terlantar | 200 Anak | 200 Anak | 100% |

Sumber : Data diolah oleh peneliti dari Laporan Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021

 Berdasarkan data diatas dalam tahun 2021 hanya terdapat tiga kegiatan yang berhubungan dengan anak terlantar yaitu pemenuhan kebutuhan dasar anak terlantar diluar panti, pemberian pelayanan reunifikasi keluarga dan penyediaan sandang bagi anak terlantar yang mana hanya dua dari tiga kegiatan yang mencapai target yaitu 100%. Kegiatan pemberian pelayanan reunifikasi keluarga masih belum dapat mencapai target yang telah ditentukan. Kuantitas kerja Dinsos Kabupaten Lampung Tengah terkait anak terlantar terdiri dari lima kegiatan dari dua bidang melalui dua program. Kegiatan tersebut merupakan hasil dari perencanaan usulan rekan-rekan bidang yang menangani berdasarkan kemampuan dan kebutuhan.

* 1. ***Quality of work***

Pengumpulan data yang dilakukan melalui metode dokumentasi diperoleh data terkait dengan presentase jumlah anak terlantar di luar panti Kabupaten Lampung Tengah tahun 2018-2020 berdasarkan Lakip Dinsos Lampung Tengah tahun 2021 sebagai berikut :

**Tabel 1
Presentase Jumlah Anak Terlantar Di Luar panti Kabupaten Lampung Tengah tahun 2018-2020**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Tahun** | **Persentase** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | 2018 | 64,21 % |
| 2 | 2019 | 30,51 % |
| 3 | 2020 | 33,56 % |

Sumber: Lakip Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah tahun 2021

Berdasarkan data yang diperoleh melalui dokumentasi didapatkan bahwa terjadi penurunan kualitas kerja berdasarkan hasil indikator target realisasi capaian kegiatan di tahun 2019 namun kemudian meningkat dari tahun 2019-2021. Hal tersebut menandakan adanya evaluasi dan perbaikan dalam upaya peningkatan kualitas kerja. aspek kualtias kerja mengalami penurunan di tahun 2018-2019 yang kemudian melakukan evaluasi dalam meningkatkan kualitas. Selain itu berdasarkan data dokumentasi didapatkan bahwa penanganan anak terlantar memiliki capaian 100% dan hal tersebut diperkuat melalui wawancara dengan masyarakat yang menyatakan sudah berkurangnya jumlah anak terlantar yang terlihat di wilayah area Kabupaten Lampung Tengah serta adanya kegiatan patroli yang dilakukan oleh Tim Gabungan antara Dinas Sosial dan Satpol PP.

1. ***Job Knowledge***

Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah didapati bahwa masing-masing PNS dalam melakukan kegiatan terkait anak terlantar telah mengetahui pengetahuan dan informasi terkait kegiatan yang dilakukan. Sehingga dapat dikatakan bahwa masing-masing PNS di Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah telah mengetahui tugas dan fungsinya masing-masing dan bagaimana berjalannya kegiatan. PNS di bidang Rehsos dan PJS merupakan orang lama yang memiliki pengalaman kerja dan kemampuan memahami kondisi. Selain itu peneliti melakukan wawancara dengan Kabid PJS atau perlindungan dan jaminan sosial terkait kemampuan pengetahuan PNS bahwa sudah mengetahui terkait dengan Tugas pokok dan fungsi tetapi lebih ke arah pengalaman, kerja baik tugas selesai. Sedangkan untuk kemampuan PNS sudah mencukupi. kemampuan PNS di Dinsos Kabupaten Lampung Tengah telah mencukupi kualitasnya dalam menjalankan kegiatan yang berhubungan dengan anak terlantar dan menjalankan tugas pokok yang berlaku.

1. ***Cooperation***

Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah mengetaui bahwa PNS Dinsos memiliki kemauan dalam bekerja sama dalam menjalankan kegiatan dengan perangkat daerah lainnya sebagai contohnya ketika dilakukan kegiatan Sweaping anak terlantar maka PNS Dinsos membantu turun ke lapangan. Selain itu penanganan anak terlantar bekerja sama dengan pihak lain yaitu panti rehabilitasi sosial di Kabupaten Lampung Tengah sebagai upaya tindak lanjut terkait kondisi anak terlantar. PNS Dinsos memiliki kemauan dalam bekerja sama terutama dengan Satpol PP dalam melaksanakan program anak-anak terlantar. Hal tersebut menyadarkan bahwa pekerjaan ada yang harus diselesaikan dengan cara bekerja sama untuk menyelesaikannya. Selain itu peneliti melakukan wawancara dengan Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten lampung Tengah dan mendapatkan informasi bahwa kerjasama telah di lakukan Dinsos dengan Satpol PP sampai saat ini dengan hasilnya baik dan lancar hal tersebut berdasarkan kemauan dari rekan-rekan Dinsos dalam bekerja sama.

1. ***Dependability***

Keandalan atau dependability merupakan aspek tentang bagaimana kesadaran aparatur dalam menyelesaikan suatu pekerjaan dan kehadirannya. PNS Dinsos Kabupaten Lampung Tengah memiliki disiplin yang tinggi dalam kehadiran dan ketika diberikan tugas dapat menyelesaikannya dengan baik. tentang keandalan kesadaran aparatur dalam menyelesaikan pekerjaan dan kehadiran diketahui bahwa untuk kehadiran PNS datang tepat waktu hampir jarang didapati PNS yang terlambat datang ke kantor, selain itu dalam pekerjaannya juga dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik. aparatur Dinsos Kabupaten Lampung Tengah memiliki kedisiplinan kehadiran dan etos dalam menyelesaikan pekerjaan.

1. ***Initiative***

aparatur melaksanakan tugas berdasarkan apa yang menjadi kewajiban dan tanggungannya masing-masing, akan mau melakukan hal yang lain jika ada surat tugas atau perintah dari atasan mengenai hal tersebut. Inisiatif terhadap tugas-tugas baru belum terlihat dikarenakan masih melakukan hal-hal perulangan seperti melakukan kegiatan yang telah menjadi agenda tahunan Dinas Sosial. Kejadian di Bidang Rehabilitasi Sosial yang mana terdapat satu bagian yang kosong dimana tugas dari bagian yang kosong tersebut berdasarkan inisiatif kepala bidang membagi rata berdasarkan kemampuan kepada seluruh staff yang ada di bidang tersebut. Sehingga berdasarkan pengamatan bahwa masih belum adanya inisiatif dari apartur Dinas Sosial dalam halnya penanganan anak terlantar. Aparatur Dinsos masih belum adanya semangat dalam melaksanakan tugas-tugas baru hal tersebut terbukti belum adanya inovasi baru dalam proses penanganan anak-anak terlantar yang mana saat ini masih tetap bertahan dengan kondisi yang sama setiap tahunya.

1. ***Personal Qualities***

Kualitas personal atau personal qualities adalah salah satu aspek dalam penilaian kinerja aparatur yang berhubungan dengan kepribadian individu seseorang sebagai aparatur dalam memberikan pelayanan kepada publik. aparatur Dinsos Kabupaten Lampung Tengah memiliki kualitas yang baik dalam melakukan pekerjaan terutama terkait dengan penanganan anak terlantar. Hal tersebut ditandai dengan adanya kemauan penyelesian tugas terkait sweaping anak terlantar bersama dengan Satpol PP meskipun telah berada diluar jam kantor. Salah satu keandalan dari aparatur Dinsos yaitu tindakan persuatif yang dilakukan kepada anak terlantar. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya pendekatan untuk mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai anak yang terlantar tersebut supaya didapatkan solusi atau penyelesaian yang baik. Kinerja Pegawai Negeri Sipil Dinas Sosial berdasarkan Bernadin Russell didapatkan bahwa kuantitas pekerjaan sudah diatur berdasarkan peraturan dan kemampuan, kualitas kerja meski mengalami penurunan di tahun 2019 namun mengalami peningkatan hingga ke 2021, Pengetahuan aparatur terkait tugas pekerjaannya yiatu telah mengetahui tugas pokoknya, kemudian terkait dengan kooperasi bahwa aparatur mau bekerja sama dengan pihak perangkat daerah lainnya, keandalan aparatur menjadi luar biasa dengan kedisiplinan kehadiran dan etos dalam menyelesaikan pekerjaan, inisiatif belum terjadi di aparatur bidang yang menangani anak terlantar dan aparatur yang diketahui memiliki nilai kualitas individu yang bagus. Jadi dari tujuh aspek kinerja aparatur menurut Bernadin Russel didapatkan satu aspek masih belum terpenuhi kondisinya.

1. **Hambatan Yang Dialami Dinas Sosial Lampung Tengah Dalam Menanganai Anak Terlantar**

faktor penyebab terhambatnya penanganan anak-anak terlantar yaitu :

1. Waktu, Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah terhambat dengan waktu. Hal ini dikarenakan anak terlantar mulai berkeliaran pada malam hari sedangkan pada waktu malam hari sudah berada di luar jam kantor.
2. SDM, Keterbatasan Sumber Daya Manusia menjadikan salah satu permasalahan, hal tersebut berada di bidang Rehabilitasi Sosial dimana terdapat satu hal yang kosong shingga kegiatan yang menyesuaikan dengan kondisi PNS di Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah.
3. Anggaran, Keterbatasan anggara menjadi salah satu penghambat yang ada di Dinas Sosial kabupaten Lampung Tengah. Kegiatan yang mencapai target namun anggaran sudah habis serta masih banyak anak terlantar namun tidak memiliki anggaran.
	1. **Upaya Dinas Sosial Lampung Tengah Dalam Mengatasi Permasalahan Penanganan Anak Terlantar**

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam mengatasi hambatan berdasarkan diketahui bahwa :

1. Berkerjasama dengan Satpol PP dengan harapan dapat meningkatkan kualitas kerja.
2. Pembuatan shift kerja sebagia upaya mengatasi permasalahan waktu anak terlantar yang bermunculan di luar jam kantor sehingga memerlukan shift baru.
3. Meminimalkan anggaran sehingga sarana dan prasarana yang tidak dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah.
	1. **Diskusi** **Temuan Utama Penelitian**

Penelitian ini menemukan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Lampung berkerja sama dengan Satpol PP dibuktikan pada wawancara penulis dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah, Bapak Ari Nugraha Mukti, S.STP., M.M pada 10 Januari 2023 Pukul 08.00 di Ruang Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah yang menyatakan sebagai berikut : Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti didapatkan bahwa PNS Dinsos Kabupaten Lampung Tengah memiliki kesadaran yang tinggi dalam menyelesaikan pekerjaan dan kehadirannya. Hal tersebut diketahui ketika dilakukan pengamatan jarang sekali ada PNS Dinsos Kabupaten Lampung Tengah yang hadir terlambat ke Kantor dan ketika ada pekerjaan seperti kegiatan sweaping anak terlantar bersama dengan Satpol PP menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan beres.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa dalam mengatasi permasalahan dari setiap anak-anak terlantar dengan melaksanakan inovasi berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah, Bapak Ari Nugraha Mukti, S.STP., M.M pada 10 Januari 2023 Pukul 08.00 di Ruang Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah terkait dengan semangat aparatur Dinsos Lampung dalam melakukan inovasi pekerjaan dalam penanganan anak-anak terlantar sebagai berikut : “dibilang semangat ya semangat kalau inovasi lebih ke arah ngatasin permasalahan soalnya setiap anak-anak terlantar punya masalah yang beda-beda ada yang rumahnya disana ada yang ada permasalahan dirumah jadi ya inovasi pekerjaannya itu langsung ke arah anak-anak terlantar terus gimana memelihara dan melindunginya. Ada lagi kaya tanya-tanya nelusuri tentang anak terlantar itu gimana jadi bisa tau mengatasinya contohnya kemarin waktu tau anak terlantar karena liburan sekolah jadi turun kejalan ya akhirnya minta tolong ke dinas pendidikan buat ngasih edukasi kalau liburan sekolah itu dimanfaatkan yang baik-baik seperti itu.”

1. **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai kinerja Pegawai Negeri Sipil dalam penanganan anak terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut :

* + - 1. Kinerja Pegawai Negeri Sipil dalam penanganan anak terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan Teori Bernadin Russell tentang Kinerja aparatur yang terdiri dari tujuh aspek didapati bahwa kuantitas kerja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari lima kegiatan di dua bidang dengan kualitas kerja yang mencapai 100% dalam penanganan anak terlantar. Sedangkan untuk kualitas PNS memiliki pengetahuan yang mencukupi terkait dengan tupoksi dan anak terlantar dengan kedisiplinan kehadiran kerja serta mau bekerja sama namun belum ada inovasi terkait penanganan anak terlantar.
			2. Pelaksanaan penanganan anak terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur mengalami Hambatan yang disebabkan Waktu, SDM, dan Anggaran. Waktu dimana anak terlantar memunculkan dirinya setelah jam kantor sehingga kesulitan aparatur terutama Dinsos untuk mengatasinya, SDM dimana terdapat kekuarangan SDM hingga adanya satu tempat kosong di Bidang Rehabilitasi Sosial, dan anggaran menjadi hambatan karena keterbatasan anggaran yang menjadikan penanganan anak terlantar menjadi terhambat.
			3. Upaya yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah dalam mengatasi hambatan dalam penanganan anak terlantar yaitu dengan bekerja sama dengan Satpol PP untuk mengatasi permasalahan baik waktu, SDM dan anggaran

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini keterbatasan utama yakni waktu. Keterbatasan waktu penulis maksimalkan dalam proses Penelitian ini dalam hal Observasi, Dokumentasi dan Wawancara untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan penulis

**Arah Masa Depan Penelitian (future work).** Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian yang penulis laksanakan, oleh karena itu untuk melengkapi kekurangan dalam penelitian ini penulis berharap ada yang meneruskan dan memberikan masukan pada penelitian ini agar dapat memaksimalkan hasil dari penelitian ini.

1. **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian dan membagi pengetahuan kepada peneliti yang tentunya peneliti dapat terapkan pada di dunia kerja nanti.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Admin, M. i. (2021). Penanggulangan Permasalahan Sosial Di Lampung Tengah Terkendala Anggaran. Monologis.id.

Abdusasamad, D. H. Zu. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. In D. P. Rapanna (Ed.), Syakir Media Press.

Cibro, H., Purba, N., & Affan, I. (2019). Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat JURNAL HUKUM KAIDAH Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat. Jurnal Hukum Kaidah, 21(3), 387–414.

Epriadi Dkk, D. (2020). Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Anak Terlantar Usia Sekolah. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 7(4), 865–870.

Haeruman, U. (2021). Kinerja Pegawai Negeri Sipil (asn) di dinas perhubungan kota tasikmalaya. Jurnal Kajian Ekonomi dan kebijakan Publik, 6(1), 472–444.

Pananrangi, A. R., & Bahri, S. (2021). Kinerja Aparatur Dalam Pelayanan Publik (H. Halim (ed.); 1 ed.). Pusaka Almaida.

Sajow, A., Sambiran, S., & Kairupan, J. (2019). Kinerja Dinas Sosial dan Pemebrdayaan Masyarakat dalam Menangani Anak Terlantar di Kota Manado. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, 3(3), 1–9.

Samsu. (2017). Metode Penelitian Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research and Development. In Rusmini (Ed.), Pustaka Jambi (1 ed., Vol. 1, Nomor 1). Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA). https://doi.org/10.1016/S0140-6736(01)42777-2

Sandi, I. (2016). Implementasi Kebiajakn Perlindungan Anak Terlantar PADA DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI TENGAH. Jurnal Katalogis, 4(5), 150–160.

Syahra, A. (2018). ASPEK HUKUM TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR DITINJAU DARI PASAL 34 AYAT 1 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Mulati ( Corresponding Author ) A . Latar Belakang Anak merupakan rezeki , titipan , dan karunia. Jurnal Hukum Adigama, 4(2), 1–23

Yuniza, A., & Sekarini, D. (2018). Analisis kinerja aparatur dalam pembinaan anak jalanan di dinas sosial kota samarinda provinsi kalimantan timur. Jurnal MSDM, 5(2), 175–193.